

## ABSTRAK

Studi ini membahas mengenai Konflik Pertanahan Lahan Perkebunan Kalibakar antara PTPN XII (Persero) dengan Masyarakat di Kabupaten Malang. Konflik merupakan suatu gejala sosial yang tidak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat. Dalam pendekatan konflik, ilmu politik merupakan kegiatan untuk memperoleh dan mempertahankan kepentingan. Dalam penelitian ini, kepentingan yang diperjuangkan adalah tanah bekas Perkebunan Belanda yang diterbitkan Hak Guna Usahnya kepada PTPN XII. Konflik yang melibatkan PTPN XII selaku representasi dari negara dengan masyarakat di Desa Simojayan, Desa Tirtoyudo dan Desa Bumirejo merebutkan status kepemilikan tanah bekas Perkebunan Belanda tersebut. Selaku pemilik legalitas yang sah PTPN XII memiliki kewenangan untuk mengelola tanah bekas Perkebunan Belanda sepenuhnya. Sedangkan, *oral history* masyarakat berkata bahwa tanah tersebut adalah tanah perjuangan nenek moyang mereka yang sudah sepantasnya menjadi milik masyarakat. Pertarungan antara legalitas dengan oral history inilah yang kemudian memicu konflik dan menimbulkan berbagai macam aksi mulai dari aksi bisu hingga aksi protes. Aksi tersebut terjadi karena ada kepentingan yang seringkali dinihilkan.

Peneliti menggunakan teori Konflik Sosial oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin serta menggunakan metode kualitatif dan ditemukan data berupa penyebab terjadinya konflik dan upaya dalam penyelesaian konflik. Penyebab terjadinya konflik adalah adanya perbedaan persepsi dan perbedaan kepentingan antar kelompok yang berkonflik mengenai status kepemilikan tanah. Selain faktor yang sudah dipaparkan diatas, konflik tersebut terus berjalan dikarenakan adanya stimulus dari elite politik, lembaga legislatif dan partai politik. Konflik sengaja dipelihara oleh partai politik guna melakukan mobilisasi masa untuk menunjang perolehan suara dalam pemilihan umum. Konflik juga terjadi karena adanya struktur pengetahuan mengenai program *Land Reform* yang sudah terbangun secara turun temurun dikalangan petani khususnya mengenai status tanah Kalibakar. Skripsi ini juga menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang berkonflik berupaya keluar dari lingkaran konflik juga tentang bagaimana peran negara dalam upaya menyelesaikan konflik ini. Melalui jalur peradilan dan non-peradilan dilakukan oleh kelompok yang berkonflik, mulai dari negosiasi, *contending* dan pola kemitraan.

Kata Kunci : *Konflik, Konflik Sosial, Politik Pertanahan*

## ABSTRACT

This study discusses Land Conflicts of Kalibakar Plantatin Area between PTPN XII (Persero) with the community in Malang Regency. Conflict is a social phenomenon that can not be separated from community life. In conflict approaches, political science is an activity to gain and sustain interest. In this research, the interests that are fought for is the former land of Dutch Planation which issued by Hak Guna Usaha to PTPN XII as represent the state with the people in Simojayan Village, Tirtoyudo Village and Bumirejo Village overcane the status of land ownership of the former Dutch Planation. As the legitimate owner of legality PTPN XII authorize to manage the former land of Dutch Planation completely. Meanwhile, the oral history of the community said that the land is the land of their ancestors struggle that should be the property of the community. The fight between legality and oral history is what triggered the conflict and caused various actions ranging from mute action to protests. The action occurs because there are interests that areoften nullified.

Researchers use Social Conflict theory by Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin and use qualitative methods and found data in the from of causes of conflict and efforts in conflict resolution. The cause of the conflict is the different perceptions and differences of interest between conflicting groups regarding the status of land ownership. In addition to the factors already described above, the conflict continues to run due to the stimulus of political elites, legislative bodies and political parties. Conflict deliberately maintained by political parties to mobilize and efforts in conflict resolution. The cause of the conflict is the different between conflicting groups regarding the status of land ownership resulting in various actions ranging from mute action occurs because there are interest that are often nullified. In addition to the factors already described above, the conflict continues to run due to the stimulus of political elites, legislative bodies and political parties. Conflict also occurs because of the knowledge structure of the land reform program that has been built up from generation among the farmers especially regarding the status of Kalibakar Land. This tesis also explains how conflicting parties seek to get out of the conflict circle as well as on how the state plays in the effort to resolve this conflict. Judicial and non-judicial channels are conducted by conflicting groups, from negotitation, contending and partnership patterns.

*Keywords* : *Conflict, Social Conflict, Land Politics*